Eksistensi Sistem Hukum Waris Adat Dengan Sistem Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Melayu Riau Lingga

Rafi Jamil *¹
Canthika Putri ²
Azman ³
Fanny ⁴

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: 2105040120@student.umrah.ac.id¹, canthikaputri27@gmail.com²,
2105040127@student.umrah.ac.id³, shalondaaaaaa@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi sistem hukum waris di kalangan masyarakat Melayu Riau Lingga, dengan fokus pada sistem patrilineal, serta tantangan dalam menerapkan hukum waris Islam di tengah tradisi adat. Dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum waris adat dan Islam, serta tinjauan terhadap teori-teori hukum yang relevan. Temuan menunjukkan kesenjangan antara praktik hukum adat dan ajaran Islam. Selain memberikan saran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsip Islam dalam pembagian warisan, juga diperkuat kerjasama antara lembaga keagamaan dan pemerintah setempat dalam memberikan bimbingan hukum kepada masyarakat. Diharapkan, upaya ini dapat menciptakan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks warisan di masyarakat Melayu Riau Lingga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Temuan menyimpulkan bahwa sistem hukum waris adat Melayu Riau Lingga masih dipengaruhi oleh struktur patrilineal, sementara tantangan penerapan hukum waris Islam masih signifikan. Saran disampaikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan prinsip-prinsip Islam dalam pembagian warisan dan memperkuat kerjasama antara lembaga keagamaan dan pemerintah setempat.

Kata kunci: Eksistensi, Hukum adat, Hukum Islam, Melayu Riau Lingga

Abstract

This research explores the inheritance law system among the Riau Lingga Malay community, with a focus on the patrilineal system, as well as the challenges in implementing Islamic inheritance law amidst customary traditions. An analysis of the principles of customary and Islamic inheritance law was carried out, as well as a review of relevant legal theories. The findings show a gap between customary law practices and Islamic teachings. Apart from providing suggestions to increase public understanding of Islamic principles in the distribution of inheritance, cooperation between religious institutions and local government is also strengthened in providing legal guidance to the community. It is hoped that this effort can create harmonization between customary law and Islamic law in the context of heritage in the Riau Lingga Malay community. The research method used is a normative approach with qualitative analysis of primary and secondary legal sources. The findings conclude that the Riau Lingga Malay traditional inheritance law system is still influenced by the patrilineal structure, while the challenges of implementing Islamic inheritance law are still significant. Suggestions were made to increase public understanding of Islamic principles in the distribution of inheritance and strengthen cooperation between religious institutions and local governments.

Keywords: Existence, Customary Law, Islamic Law, Malay Riau Lingga

PENDAHULUAN

Hukum waris adalah aturan yang mengatur tentang distribusi harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Hukum ini menentukan bagaimana harta benda tersebut dialihkan dari pewaris, yaitu orang yang telah meninggal, kepada ahli waris, yaitu individu-individu yang masih hidup dan ditinggalkan oleh pewaris. Dengan kata lain, hukum waris adalah serangkaian

aturan yang mengatur proses perpindahan hak atas harta peninggalan pewaris kepada ahli waris¹. Indonesia merupakan negara yang memiliki tiga jenis hukum waris, Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Setiap wilayah memiliki sistem hukum waris yang berbeda-beda yang didasarkan pada tradisi kekerabatan yang mereka anut. KUHPperdata menganggap hak mewarisi sebagai hak benda atas harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah meninggal, sehingga dalam KUHPperdata diatur dalam Buku II tentang Benda.²

Sebagaimana diartikan Ter Haar dalam *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat* hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi, pada generasi berlaku. Sehingga hukum waris adat dapat dikatakan sebagai kebiasaan yang hidup di kelompok masyarakat adat untuk melakukan pewarisan kepada harta atau benda.

Hukum adat adalah suatu model hukum yang dibangun baik bersifat riil maupun idiil dari bangsa Indonesia dengan bahasa suku bangsa itu.³ Berlakunya hukum adat di masyarakat, menurut Moh. Koesno bersandar pada kehalusan rasa harmoni dari para anggota masyarakat yang mendatangkan rasa susila yang tajam bagi mereka. Rasa susila yang tinggi inilah yang memberi mereka kepekaan terhadap rasa malu, rasa takut akanterkena "wirang" atau "sirik."³

Negara Indonesia mengakui atas hak masyarakat adat yang juga diakui dalam konstitusi didalam pasal 18 B UUD NRI 2945 "mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia". Maka dari itu segala ketentuan adat yang masih hidup di Indonesia tetap diakui selagi memang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Dalam konteks kebudayaan, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil objek masyarakat di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang mayoritas suku melayu. Berdasarkan latar belakang sejarah, Kerajaan Melayu identik dan selaras dengan sistem hukum Islam dikarenakan sistem hukum pada masa Kerajaan Riau Lingga, hukum yang digunakan oleh masyarakatadalah hukum Islam. Sedangkan dalam garis keturunan masyarakat Melayu menganut sebagian besar menganut prinsip *patrilineal* (keturunan dari garis ayah) namun sebagian masyarakat juga memegang prinsip kekerabatan *bilateral* yang menyandarkan keturunan pada ayah dan ibu. Seiring perkembangangenerasi sistem waris masyarakat di Kecamatan Singkep yang sejatinya menerapkan hukum Islam dalam berbagai hal termasuk

¹ Ni Putu Yuli Kartika Dewi dan Ni Putu Putwanti, "Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no 2 (2016): 1-5. hlm. 3.

² Muhammad Saleh and Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya* (Bandung, 2012).

³ Peter Burns, *Adat Dalam Politik Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

pembagian waris kini mulai bergeser. Sebagaimana menurut Eugen Ehrlich *“At the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in legislation, not in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself”* yang berarti bahwa perkembangan hukum bukan terletak pada perundang-undangan, ilmu hukum dan putusan pengadilan melainkan pada masyarakat itu sendiri

Sistem hukum waris adat dipengaruhi oleh corak dan bentuk kemasyarakatan yang disusun berdasarkan faktor genealogis dan teritorial. Oleh karena itu, setiap sistem kekerabatan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhasan atau corak yang berbeda dan masing-masing berbeda-beda. Dalam bentuk masyarakat sistem patrilineal, yaitu sistem hukum yang menarik garis keturunan berdasarkan garis keturunan ayah (laki-laki). Dalam hal ini kedudukan laki-laki sangat menonjol atau kuat, misalnya: di masyarakat Batak yang berkah pewaris hanya laki-laki. Seorang perempuan yang sudah kawin akan keluar dari kerabatnya dan mengikuti suami setelah jujuran lunas, semua anaknya juga masuk dalam kerabat suaminya. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu (perempuan), anak perempuan lebih menonjol dari anak laki-laki, yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan (Minangkabau). Sistem Bilateral/Parental, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari dua sisi baik pihak ayah atau ibu. Maka, kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama, yang keduanya sama-sama merupakan ahli waris dari kedua orang tuanya.

Perubahan atau pergeseran yang terjadi pada masyarakat Melayu adalah sebagian besar mulai meninggalkan prinsip yang luhur. Khususnya dalam hal pembagian harta waris. Dahulunya masyarakat masih menerapkan hukum waris Islam secara menyeluruh dalam perkara pembagian waris. Namun kini umumnya masyarakat lebih memprioritaskan kerabat tertentu untuk menerima harta waris. Bahkan makna secara umum prinsip prioritas ini adalah suatu landasan dan pola pikir masyarakat di Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau untuk mendahulukan atau melebihkan bagian ahli waris tertentu baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dalam pemberiannya dari ahli waris yang lain.

Tradisi atau prinsip ini kemudian menarik perhatian peneliti untuk mencari tahu lebih mendalam prinsip prioritas yang kini berlaku pada masyarakat di Kecamatan Singkep, Kepulauan Riau. Kemudian menyampaikannya kedalam bentuk karya ilmiah dengan metode penelitian dan disertai dengan berbagai perspektif hukum nasional.

METODE

Studi ini membutuhkan pemahaman tentang konsep teori dan regulasi hukum yang berlaku. Peneliti melakukan penelitian ini dengan mengeksplorasi inti yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk jurnal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan

menggunakan pendekatan hukum positif (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).⁴

Sumber-sumber yang digunakan berasal dari kepustakaan atau yang dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari analisis teoritis dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan hapusnya hak waris. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Hukum Waris Adat Melayu Riau Lingga

Kecamatan Singkep adalah pusat perdagangan yang berkembang lebih cepat dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Lingga. Selain itu, Kecamatan Singkep merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Pulau Singkep dan berbatasan darat dengan Kecamatan Singkep Barat. Pulau Singkep pernah menjadi salah satu penghasil timah utama sebelum Bangka Belitung, sehingga masyarakat di Pulau Singkep mengalami perkembangan dan kemajuan lebih awal dibandingkan dengan pulau atau wilayah lain di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Hukum kekeluargaan mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan keluarga, keturunan, dan ikatan pernikahan. Sistem kekerabatan atau keluarga merujuk pada hubungan keluarga yang terbentuk melalui pernikahan. Masyarakat adat di Indonesia memiliki berbagai macam sistem kekerabatan, termasuk matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem matrilineal, seperti yang ditemukan pada masyarakat Minangkabau, menelusuri garis keturunan melalui anak perempuan. Sebaliknya, sistem patrilineal, seperti yang ada di Bali, menelusuri garis keturunan melalui anak laki-laki. Sementara itu, sistem bilateral menelusuri garis keturunan dari kedua belah pihak (anak laki-laki dan perempuan).

Sistem waris patrilineal berakar pada struktur masyarakat dan sifat kekeluargaan patrilineal, seperti pada masyarakat Melayu Riau Lingga, di mana hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris karena anak perempuan tidak termasuk dalam golongan patrilineal. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang mendasari hukum waris adat patrilineal sehingga hanya keturunan laki-laki yang berhak mewarisi, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan bagian sama sekali. Beberapa alasan tersebut adalah:

1. Emas kawin disebut "tukor," yang menunjukkan bahwa perempuan telah "dijual."
2. Adat "lokonan (levirat)" menunjukkan bahwa perempuan diwarisi oleh saudara suaminya yang telah meninggal.

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017). hlm. 69.

⁵ Ishaq.

3. Pandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang mudah ditipu.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat patrilineal seperti masyarakat adat melayu riau lingga, laki-laki berhak mewarisi harta pewaris. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Garis keturunan didasarkan pada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak dianggap dapat melanjutkan silsilah keluarga.
2. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga dan anak-anak menggunakan nama keluarga atau marga ayah, sementara istri digolongkan dalam keluarga suami.
3. Dalam adat, perempuan tidak dapat mewakili orang tua (ayah) karena sudah menjadi anggota keluarga suaminya.
4. Dalam adat, laki-laki dianggap sebagai anggota keluarga yang penting sebagai orang tua atau ibu.
5. Dalam perkawinan adat patrilineal, perempuan dianggap keluar dari keluarganya dan menjadi bagian keluarga suaminya setelah menikah.

Ahli waris dalam sistem waris adat patrilineal terdiri dari anak laki-laki, anak angkat, ayah, ibu, saudara kandung, keluarga terdekat, dan persekutuan adat. Sistem waris adat patrilineal pada dasarnya menarik garis keturunan dari ayah atau nenek moyang laki-laki. Anak laki-laki berhak atas semua harta benda yang ditinggalkan orang tua mereka, berdasarkan pandangan kuno yang merendahkan kedudukan wanita dalam masyarakat Karo khususnya dan Batak pada umumnya. Dalam urutan ahli waris, anak laki-laki dan anak angkat berada di urutan pertama, ayah, ibu, dan saudara kandung pewaris di urutan kedua, keluarga terdekat di urutan ketiga, dan persekutuan adat di urutan terakhir.

Salah satu prinsip yang berkembang di masyarakat melayu riau lingga yaitu. Prinsip prioritas bukanlah sistem pembagian warisan yang diterapkan secara keseluruhan atau permanen. Dalam konteks adat, masyarakat Melayu sangat dikenal dengan norma-norma keislaman yang kuat. Oleh karena itu, prinsip prioritas ini tentu memiliki beberapa maksud dan tujuan yang baik.

Secara umum, prinsip prioritas menyampaikan pesan tentang saling tolong-menolong dan berbagi yang tinggi. Namun, secara khusus, prinsip ini bertujuan untuk membantu kerabat atau keluarga yang kurang secara ekonomi dan mampu mengelola harta warisan dengan baik. Dengan kata lain, prinsip ini bertujuan untuk memaksimalkan manfaat dari harta peninggalan.

Asas yang berkembang dalam hukum waris adat yaitu ;

- a) *Asas ketuhanan*, yakni masyarakat meyakini secara penuh bahwa harta peninggalan merupakan rezeki dari Allah SWT. Serta patut disyukuri dan dimanfaatkan semestinya.
- b) *Asas kemanusiaan*, yakni seluruh ahli waris memiliki hak dan kewajiban yang sama atas harta peninggalan tersebut.

- c) *Asas persatuan*, masyarakat di Kecamatan Singkep memiliki harapan agar pembagian waris dapat menjaga persatuan dan kekerabatan bukan sebaliknya.
- d) *Asas musyawarah*, yakni meski dengan ketetapan pasti dari secara hukum waris Islam, namun musyawarah mufakat tetap dilaksanakan dengan maksud agar tidak ada rasa iri hati
- e) *Asas keadilan*, yakni pembagian harta waris dengan prinsip prioritas ini dengan maksud untuk menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Pembagian warisan tentu memiliki tahapan dan tata cara pelaksanaannya sendiri. Sistem pembagian harta waris dalam masyarakat Melayu, yang mengandung prinsip prioritas, juga mengikuti prosedur tertentu. Secara umum, semua narasumber menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta waris dengan prinsip prioritas tidak berbeda secara signifikan dalam hal substansi. Prinsip prioritas di Kecamatan Singkep tidak sepenuhnya mengabaikan sistem kewarisan Islam. Masyarakat biasanya masih berkonsultasi dengan tokoh agama atau orang yang memahami hukum faraidh untuk memperjelas ahli waris dan bagian masing-masing.⁶

Secara teknis, masyarakat tidak terikat oleh kebiasaan yang ada dalam memilih sistem pembagian waris atau menentukan siapa yang ikut serta dalam pembagian warisan. Mereka dapat meminta bantuan alim ulama untuk pembagian berdasarkan faraidh atau memilih cara lain. Selain itu, masyarakat juga bebas untuk melakukan pembagian secara terbuka atau tertutup hanya di hadapan kerabat.

Dalam penyelesaian sengketa, Pembagian waris memang sensitif terhadap sengketa. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bagian-bagian tertentu untuk menghindari perselisihan yang dapat berdampak lebih jauh. Meskipun prinsip yang berlaku di masyarakat Melayu Kecamatan Singkep juga berpotensi menimbulkan sengketa, beberapa narasumber menyatakan bahwa kasus sengketa waris jarang sampai ke pengadilan. Bapak Hazmi Jaya Putra menyampaikan bahwa tidak banyak kasus sengketa waris yang sampai ke ranah hukum, karena mindset masyarakat yang kurang terbiasa dengan pengadilan.

2. Tantangan Penerapan Sistem Hukum Waris Islam di Masyarakat Adat Melayu Riau Lingga

Teori *receptie a contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib memberikan beberapa kesimpulan mengenai hukum perkawinan dan hukum waris, yaitu:

1. Bagi orang Islam, berlaku hukum Islam.
2. Hukum Islam berlaku sesuai dengan cita hukum, moral, dan batin umat Islam.
3. Hukum adat berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

⁶ Ayu Pebrianti, Rotua Marbun, and Yesica Elonika, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PERKAWINAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA : Antara Solusi Dan Tradisi" 8, no. 2 (2023).

Sayuti Thalib menyebut teori *receptie Hurgronje* sebagai teori yang menyesatkan, karena tidak berasal dari syariat maupun akal sehat. Menurutnya, hukum Islam adalah hukum yang berdiri sendiri dan tidak bisa ditundukkan oleh hukum adat, sehingga hukum Islam harus menjadi landasan bagi hukum adat. Pandangan Sayuti Thalib sejalan dengan filosofi:

1. Adat harus tunduk pada hukum syarak.
2. Adat harus tunduk pada hukum syarak, dan hukum syarak harus bertopang pada adat.
3. Adat harus tunduk pada syarak, dan syarak harus tunduk pada al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

Dengan demikian, hukum waris adat yang bisa diterima adalah yang tidak bertentangan dengan sistem pewarisan Islam.

Sementara itu, teori eksistensi dikembangkan oleh Ichtiyanto untuk mempertegas dan mengeksplisitkan teori *receptie a contrario* dalam konteks sistem hukum nasional. Teori ini menegaskan eksistensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dengan menyatakan bahwa:⁷

1. Hukum Islam ada sebagai bagian integral dari hukum nasional.
2. Hukum Islam, dengan kewibawaannya, harus diakui dan diberi status sebagai hukum nasional.
3. Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional.
4. Hukum Islam adalah sumber utama dalam penemuan hukum nasional yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Adanya penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi dari upaya pemerintah mengembalikan hukum Islam untuk menjadi sumber hukum utama dalam sistem hukum nasional. Demikian pula, dengan adanya nilai-nilai Islam yang terdapat dalam kandungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan bukti bahwa hukum Islam telah menjadi hukum adat dalam masyarakat pada masa pemerintahan raja-raja Islam di seluruh Indonesia.

Dalam hal ini hukum Islam berfungsi sebagai penyaring hukum adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Ismail Puhri mengatakan, hukum waris adat yang hidup dan berlaku dalam masyarakat sekarang ini bukan lagi hukum waris adat yang sesuai dengan falsafah adati *hula-hula'a to syara'a*, *syara'a hula-hula'a to Kitabi*. Hal ini terlihat pada adanya penyimpangan dalam praktik pewarisan dalam masyarakat, seperti: adanya praktik penundaan pembagian harta warisan; adanya pemikiran bahwa harta warisan baru akan dibagi bila terjadi sengketa; penundaan pembagian harta warisan dilakuk-an untuk menghargai salah seorang dari orang tua masih hidup; pemberian wasiat kepada anak perempuan; penetapan besarnya bagian untuk masing-masing ahli waris dengan sama-rata; pemberian

⁷ Putu Yuli Kartika Dewi and Putu Putwanti, "Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)."

bagian kepada anak angkat; pembagian harta warisan dilakukan sebelum kematian pewaris; dan terdapat pula sebagian masyarakat yang membagi harta warisan sama-sekali tidak. Ismail Puhi mengatakan, praktik pewarisan seperti ini, tidak sejalan dengan falsafah adati hula-hula'a to syara'a, syara'a hula-hula'a to Kitabi.

Maka dengan ini dapat dipastikan hukum waris adat melayu riau lingga tetap berpedoman kepada aturan islam yang berlaku.

KESIMPULAN

Sistem hukum waris adat Melayu Riau Lingga, terutama yang berakar pada sistem patrilineal, masih sangat dipengaruhi oleh struktur masyarakat dan sifat kekeluargaan yang patrilineal. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum waris Islam di tengah masyarakat adat Melayu Riau Lingga menemui tantangan yang signifikan. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam hukum adat, masih terdapat kesenjangan antara praktik hukum adat dan ajaran Islam

Saran yang bisa diajukan adalah perlunya upaya lebih lanjut dalam mendidik dan menyadarkan masyarakat akan prinsip-prinsip Islam yang sejalan dengan hukum waris, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang urgensi mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam pembagian warisan. Selain itu, perlu diperkuat lagi kerjasama antara lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah setempat dalam memberikan pendampingan dan bimbingan hukum kepada masyarakat dalam konteks hukum waris Islam. Selain itu, perlunya penegakan hukum yang lebih efektif untuk mengatasi penyimpangan dalam praktik pewarisan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, akan tercipta harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks warisan di masyarakat Melayu Riau Lingga.

DAFTAR PUSTAKA

- Burns, Peter. *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cetakan I. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Pebrianti, Ayu, Rotua Marbun, and Yesica Elonika. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAS PERKAWINAN DINI TERHADAP PENDIDIKAN ANAK SUKU LAUT DI KABUPATEN LINGGA : Antara Solusi Dan Tradisi" 8, no. 2 (2023).
- Putu Yuli Kartika Dewi, Ni, and Ni Putu Putwanti. "Tata Cara Penuntutan Hak Waris Oleh Ahli Waris Yang Sebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)." *Jurnal Ilmu Hukum*, 2016, 1-5.
- Saleh, Muhammad, and Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*. Bandung, 2012.